

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmadja, I. Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Budi, Arya, 2012, *Partai Aceh: Transformasi GAM?*, Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, *Aceh: Keindahan Wisata Alam dan Budaya*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Banda Aceh.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.S., Salim, dkk., 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hidajat, Imam, 2009, *Teori-Teori Politik*, Setara Press, Malang.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan Indonesia*, Nusamedia, Bandung.
- _____, 2013, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Husein, H.M. Wahyudin dan Hufron H., 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ishak, Otto Syamsuddin, 2009, *Perdamaian: yang Berikhtiar, yang Menentang (Kronik Perundingan GAM-RI di Helsinki 2005)*, Achehnese Civil SocietyTask Force, Aceh.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAT ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Khatimah, Husnul, 2007, *Penerapan Syari'ah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2008, *Laporan Situasi Politik dan HAM Aceh Tahun 2007: Belum Ada Jaminan Keadilan*, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Banda Aceh.

Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTY R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung.

Latif, Abdul dan Hasbi H., 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manan, Bagir, 1996, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah, Hukum dan Politik Indonesia (Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Hartin, dkk (Ed.), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____, 1944, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

MD, Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

_____, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.

Mauna, Boer, 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung.

Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi Keenam*, Rajawali Press, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhjad, H.M. Hadin dan Nuswardani, Nununk, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publisher, Yogyakarta.

Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAT ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Ratnawati, Iri, 2006, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Sabarno, Hari, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, H.M. Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2009, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Perspektif Partisipatif di Aceh)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Shomad, Abd., 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 2012*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta.

Soesilo dan R. Pramudji, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie/BW)*, Wipress, tanpa kota.

Sukardja, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif, 2012, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, Kanun*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syaukani, dkk., 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Peneliti Centre for International Relations Studies (Tim Syamsul Hadi, dkk), 2007, *Disintegrasi Pasca Orde Baru Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAT ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN

ACEH (Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Sidang Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Setjend DPR RI, Jakarta.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Sartika Intaning Pradhani, 2016, "Pengaturan dan Pengelolaan Keuangan Urusan Kebudayaan sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Annisha Putri Andini, 2014, "Tanggung Jawab Negara terhadap Penegakan HAM di Aceh Pasca MoU Helsinki", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Fauziah Suci Anggraini, 2013, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Helmy Boemiya, 2014, "Penerapan Desentralisasi Asimetris Terhadap Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Makalah dan Laporan Penelitian

Pratikno, dkk (Tim Peneliti Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM), 2010, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia Praktek dan Proyeksi", *Laporan Akhir Penelitian*, Yayasan Tifa dan Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Artikel suatu Jurnal

Djohan, Djohermansyah, 2013, "Desentralisasi Asimetris Aceh dan Permasalahannya", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 42 Tahun 2013.

Fauzi, Iskandar Z., F. Tubagus Erif, dan Abdullah, Taufik, 2007, "Paska Kepergian Aceh Monitoring Mission (AMM)", *Seumike (Jurnal Kajian Aceh)*, Volume 3, (No. 1).

Isra, Saldi 2013, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Kajian dari Aspek Konstitusi", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 42 Tahun 2013.

Maksum, Irfan Ridwan, "Desentralisasi Asimetris dan Otonomi Khusus di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 42 Tahun 2013.

F. Esai/Artikel dalam Suatu Buku Kumpulan Esai/Artikel

Akmal, Saiful, "Aceh: Laboratorium Politik Jakarta", Fajran Zein (Ed.), 2010, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, Aceh Institute Press, Banda Aceh.

Andini, Annisha Putri, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Syariah Islam di Aceh", Ramadani, Rizki (Eds.), 2015, *Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran*, Genta Press, Yogyakarta.

Damanik, Khairul Ikhwan, "Telaah Otonomi Daerah Indonesia", Bungaran Antonius Simanjuntak (Ed.), 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sumardi, Dedy, "Akar Sejarah Syariah Islam di Aceh", Saifuddin Bantasyam dan M. Siddiq (Eds.), 2009, *Aceh Madani dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syariah Islam di Aceh*, Aceh Justice Resource Center (AJRC), Banda Aceh.

G. Internet

Angriani, Jum, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya" (*online*), <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/11%20Jum%20Anggrian%20i.pdf>, diakses 22 Maret 2016.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAT ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

(Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional” (*online*), <http://hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt515e6f4ee9f98/.../lt515e6e9867c2e>, diakses 23 Juni 2016.

Banta Syahrizal, Teuku, “Peran Aktif Masyarakat Sipil Aceh dalam Pembentukan Rancangan UU Pemerintahan Aceh” (*online*), <http://acstf.org/2006/02/peran-aktif-masyarakat-sipil-aceh-dalam-pembentukan-rancangan-uu-pemerintahan-aceh/>, diakses 31 Maret 2016.

BBC Indonesia, “Wapres: Syariat Islam di Aceh Tidak Boleh Bertentangan dengan Hukum Nasional” (*online*), http://bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150821_indonesia_wapres_syariatislam_aceh, diakses 8 Januari 2016.

BBC Indonesia (Heyder Affan), “Mereka Menyoroti Penerapan Syariat Islam di Aceh” (*online*), http://bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150817_indonesia_gam_syariatislam, diakses 8 Januari 2016.

BBC Indonesia (Heyder Affan), “Bingkisan Syariat Islam Itu diletakkan di Depan Parlemen Aceh” (*online*), http://bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150815_indonesia_wwcr_malikhmahmud, diakses 29 Maret 2016.

BKPM., “Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1996 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional” (*online*), peraturan.bkpm.go.id/jdih/lampiran/Kepmendikbud_002_1996.pdf, diakses 7 Oktober 2015.

Bugi, Mochamad, “Mengenal Syariat Islam Bagian I” (*online*), <http://dakwatuna.com/2008/02/25/412/mengenal-syariat-islam-bagian-1/#axzz3x108zmj3>, diakses 12 Januari 2016.

Crisis Management Initiative; Marti Ahtisaari Centre, “Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh” (*online*), http://cmi.fi/aceh/pdf/aceh_report5_indo2.pdf, diakses 7 Januari 2016.

Departemen Kehutanan, “Profil Kehutanan: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” (*online*), <http://dephut.go.id/uploads/files/4e58087e6c859194b5dfae4f6aee1058.pdf>, diakses 18 Nopember 2015.

Okezone.news (Diputra, Rizka), “Hari Ini, Peringatan 5 Tahun Perjanjian Helsinki” (*online*), <http://news.okezone.com/read/2010/08/15/337/363092/hari-ini-peringatan-5-tahun-perjanjian-helsinki>, diakses 9 Desember 2013.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAH ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

(Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Fadil, Iqbal, "Nota Kesepahaman RI-GAM Melanggar UUD 1945" (*online*), <http://news.detik.com/read/2005/08/20/072707/425539/10/nota-kesepahaman-ri-gam-melanggar-uud-1945>, diakses 7 Desember 2013.

Hafidhah (Seuramoe Informasi Pemerintah Aceh), "Geografis Aceh" (*online*), <http://acehprov.go.id/profil/read/2014/01/30/11/geografis-aceh.html>, diakses 11 Nopember 2015.

Hukum Online, "Kesepakatan Damai RI-GAM Termasuk Perjanjian Internasional?" (*online*), <http://hukumonline.com/berita/baca/hol13233/kesepakatan-damai-rigam-termasuk-perjanjian-internasional>, diakses 22 Juni 2016.

Hukum Online.com, "Qanun Hukum Jinayah, Kitab Pidana ala Serambi Mekkah" (*online*), <http://hukumonline.com/berita/baca/lt54d80e8854ee1/Qanun-hukum-jinayah--kitab-pidana-ala-serambi-mekkah>, diakses 22 Maret 2016.

Hukum Online.com (Prasetyo, Bimo dan Asharyanto), "Perbedaan antara Perjanjian dengan MoU" (*online*), <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou>, diakses 27 September 2013.

International Center for Transitional Justice (ICTJ), "Pentingnya Pertanggungjawaban: 5 Tahun Memorandum of Understanding Helsinki" (*online*), <https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-MoU-2010-Indonesian.pdf>, diakses 7 Januari 2016.

Isra, Saldi, "Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh" (*online*), <http://saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/336-pembagian-kewenangan-pusat-daerah-dalam-undang-undang-nomor-11-tahun-2006-tentang-pemerintahan-aceh.html>, diakses 14 Mei 2016.

Kontras.org, "Konflik dan Perdamaian; Kondisi Ham di Aceh, Poso, dan Papua" (*online*) <https://kontras.org/buku/laptah2006/annual%20HAM-bab3.pdf>, diakses 2 April 2016.

KPPOD.org (Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), "Analisis CSIS Politik Kekerabatan di Indonesia Vol. 40 No. 2 (Artikel berjudul Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia", oleh Robert Endi Jaweng)" (*online*), <http://kppod.org/datapdf/artikel/artikel-ej3.pdf>, diakses 15 Oktober 2015.

Mas'ud, Said, "Perlu Desentralisasi Asimetris" (*online*), <http://Profmmasudsaid.com.>, diakses 14 Oktober 2015.

Merdeka.com., "Pakar: MoU Helsinki Tak Langgar UUD '45" (*online*), <http://merdeka.com/politik-nasional/pakar-mou-helsinki-tak-langgar-uud-45-yeoedvn.html>, diakses 7 Desember 2013.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAT ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

(Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Misry, A., tanpa judul (*online*), <http://digilib.uinsby.ac.id/692/4/Bab%201.pdf>, diakses 29 Maret 2016.

Rappler (Firdaus, Febriana dan Hasan, Nurdin), “Syariat Islam di Aceh: HRW sebut penerapannya langgar HAM” (*online*), <http://rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/84749-kontroversi-syariat-islam-di-aceh>, diakses 29 Maret 2016.

Shadiqin, Sehat Ihsan, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syari'at Islam Aceh untuk Masyarakat Modern* (*online*), <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252354&val=6802&title=Islam%20dalam%20Masyarakat%20Kosmopolit:%20Relevankah%20Syariat%20Islam%20Aceh%20untuk%20Masyarakat%20Modern?>, diakses 11 Januari 2016.

Sianturi, Eddy MT., “Implikasi Kesepakatan Damai MoU Helsinki terhadap Integrasi Nasional” (*online*), <http://balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implikasi--damai-mou-helsinki-terhadap-integrasi-nasional>, diakses 1 Oktober 2012.

Tempo.co (Ramadhani), “Ketua MK: Qanun Aceh Setingkat Perda” (*online*), <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/30/063476946/ketua-mk-qanun-aceh-setingkat-perda>, diakses 6 Mei 2016.

The Aceh Institute, “Briefing Paper The Aceh Institute, Quaterly Report II” (*online*), acehinstitute.org/.../10_132a45dbf9bf54739eff49574f94fb4f.html, diakses 11 Oktober 2015.

Tribun Nasional, “Menjawab Gubernur Aceh Soal Utang MoU Helsinki, Ini Kata Jusuf Kalla” (*online*), <http://tribunnews.com/nasional/2015/11/16/menjawab-gubernur-aceh-soal-utang-mou-helsinki-ini-kata-jusuf-kalla?page=1>, diakses 19 Maret 2016.

Gatranews (Waluyo, Dwitri), “Soft Power Dalam Penyelesaian Konflik Aceh: Studi Tentang Politik Desentralisasi di Aceh” (*online*), <http://gatra.com/kolom-wawancara/8419-darmansjah-djumala-soft-power-untuk-konflik-papua.html>, diakses 12 Nopember 2015.

Wardhana, Budi Nugraha, “Perbedaan MoU dengan Perjanjian” (*online*), <http://hukum.kompasiana.com/2013/02/14/-perbedaan-mou-dengan-perjanjian-528626.html>, diakses 27 September 2013.

H. Lainnya

Teuku Kemal Fasya, “RUU PA dan Rekonstruksi Aceh”, dimuat dalam *Kompas*: edisi 6 Februari, 2006. (Tulisan Opini yang diberikan secara langsung dalam bentuk *softcopy* kepada penulis oleh salah satu narasumber)



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**POLITIK HUKUM PENGATURAN SYARIAT ISLAM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN**

**ACEH (Analisis Perbandingan Memorandum of Understanding Helsinki dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun**

2006 tentang Pemerintahan Aceh)

ANNISHA PUTRI ANDINI, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Teuku Kemal Fasya, "Syariat Islam dalam Ambivalensi Sosial", dimuat dalam
Media Indonesia, 2005. (Tulisan Opini yang diberikan secara langsung dalam
bentuk *softcopy* kepada penulis oleh salah satu narasumber)